



# Lutfi: Aset Pemprov Tak Terawat

## Wagub Pastikan Terus Berbenah

PONTIANAK, TRIBUN - Anggota Komisi III DPRD Kalbar Lutfi A Hadi mempertanyakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang didapat Pemprov Kalbar dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) lantaran masih banyak aset-aset Pemprov yang tidak terurus.

"Seharusnya dengan mendapat WTP, masalah aset sudah *clear* semua. Tidak ada lagi yang terbengkalai. Coba lihat, aset-aset masih banyak

” Seharusnya dengan mendapat WTP, masalah aset sudah *clear* semua. Tidak ada lagi yang terbengkalai. Coba lihat, aset-aset masih banyak tidak terawat. ”

**LUTFI A HADI**

Anggota Komisi III

tidak terawat. Jadi ada apa WTP itu," ujar Lutfi kepada wartawan di Kantor DPRD Kalbar, Senin (2/3).

Anggota Fraksi Partai Nasdem ini menjelaskan,

berdasarkan hasil reses di Kapuas Hulu, banyak aset miliknya Pemprov yang tidak terawat. Bangunan milik Pemprov tak diurus dengan baik.

"Setelah kita pulang dari reses, kami langsung melakukan rapat bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD) Provinsi Kalbar. Mereka menjelaskan, selama ini pihaknya masih dalam proses mendata aset-aset Pemprov yang ada di kabupaten. Padahal ini aset puluhan tahun, mengapa baru di data," tuturnya.

Menurut Lutfi, kalau Pemprov tak mampu mengurus atau merawat aset, lebih baik dihibahkan ke daerah agar aset tersebut terawat dengan baik.

"Kalau kami lihat, masih banyak aset milik Pemprov di kabupaten dan kota belum di data dengan maksimal. Baik itu jumlah luas tanah dan harta benda lainnya," jelasnya.

Ia berharap, Pemprov Kalbar mempercepat proses pendataan aset. "Waktu itu alasan mereka, kewalahan mendata karena terlalu banyak aset," ungkap dewan dari Dapil tujuh meliputi Melawi, Kapuas Hulu dan

Sintang ini.

Menanggapi desakan dewan, Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya menuturkan, opini WTP yang didapatkan Pemprov dari BPK diiringi catatan-catatan tersendiri seperti masalah aset yang diakuinya belum terdata semua.

"Catatan tersebut, menjadi sebuah masukan bagi Pemprov untuk lebih serius lagi dalam menangani atau mendata masalah aset. Jumlah aset Pemprov cukup banyak, hingga butuh waktu yang cukup lama," tuturnya.

Selain itu, kata Wagub, saat melakukan pendataan aset di lapangan banyak hal yang menjadi kendala bagi petugas. Akibatnya, hingga sekarang masalah aset ini belum terselesaikan.

"Pada intinya, kami selalu berbenah untuk lebih baik lagi. Sekarang ini Pemprov terus berupaya mendata aset-aset. Kita minta dukungan semua pihak, supaya masalah aset ini bisa cepat terdata," pungkasnya. (rul)